

Dapat Bantuan Kemenhub Rp28 M Desak Pemkab Siapkan Lahan Pelabuhan Buluminung



*Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Adjie Noval Endyar.
(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Senin, 09/06/2025*

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Adjie Noval Endyar mendorong pemerintah kabupaten untuk segera membangun fasilitas pelabuhan representatif di kawasan industri Buluminung.

Hal ini terkait dengan rencana penyaluran bantuan anggaran sebesar Rp28 miliar. Dari tersebut bersumber dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan pada kawasan tersebut.

"Kita ini mau dapat bantuan untuk pelabuhan. Nah, itu karena yang tahun-tahun sebelumnya itu, kita dapat bantuan sebesar berapa puluh miliar itu tidak terserap," ujarnya, belum lama ini.

Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut cukup mendesak demi mendorong iklim investasi dan pemasukan yang pasti bagi daerah.

"Makanya kami mencoba mengulang kembali agar anggaran itu bisa kami serap untuk dibawa ke PPU. Ternyata itu sebesar Rp28 miliar, cuma dari Kemenhub ini, dia minta agar disediakan lahan sebesar dua hektare," jelasnya.

Adjie mengungkapkan, permintaan Kemenhub terkait lahan seluas dua hektare tersebut telah disepakati oleh Pemkab PPU. Namun untuk lokasi lahan tersebut masih belum ditentukan. Sehingga ia mendesak agar Pemkab bekerja ekstra agar kesempatan ini jangan disia-siakan.

Adjie mengungkapkan bahwa, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan anggaran terhadap PPU, namun tidak dapat terserap karena kendala terkait syarat-syarat administrasi yang belum sempat diselesaikan.

"Kendalanya yang lalu ini, ada syarat-syarat yang harus diselesaikan, tapi memang itu enggak sempat, ya. Padahal, kalau dipikir-pikir, seharusnya dari kita ini lebih cekatan," tambahnya.

Adjie memaparkan, pemerintah pusat telah membuka peluang kedua kalinya, sehingga perlu disikapi dengan lebih bijak oleh pemerintah daerah. "Nah, sekarang ini dibuka kembali keran tersebut. Kita mengulang kembali agar proses yang dilalui itu sesuai dengan tahapan syarat-syarat yang diminta oleh Kemenhub," terangnya.

Adapun penyediaan lahan yang diminta oleh Kemenhub, Adjie menyebut, masih belum mengetahui langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab PPU.

"Saya sampai sekarang ini belum dengar kabarnya, tapi saya rasa lahan sebesar dua hektare tidak mungkin tidak kami berikan, pasti itu," imbuhnya.

Adjie menyampaikan bahwa DPRD berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti persyaratan yang diajukan oleh Kemenhub.

Adjie menyatakan, bahwa Pemda PPU sudah sepakat terkait penyediaan lahan tersebut, namun begitu ia mengingatkan agar pemberian lahan tidak mengorbankan akses milik pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar bila ada lahan warga yang terdampak. "Cuma jangan sampai kita berikan yang menutup akses buat kita. Jangan sampai kita tertutup oleh akses mereka," tegasnya. **(ami/er)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dapat Bantuan Kemenhub Rp28 M Desak Pemkab Siapkan Lahan Pelabuhan Buluminung, 09/06/2025.

Catatan:

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah diatur sebagai berikut.

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.